

TERKAIT VIDEO PELANGGARAN PILKADA

Kajian Bawaslu Ada Unsur Pidana, Kandas di Gakkumdu

BANTUL (KR) - Geger video viral dugaan pelanggaran Pilkada dari salah satu paslon Bupati/Wakil Bupati Bantul yang memberikan uang kepada warga telah ditangani Bawaslu setempat. Tapi sampai proses pembahasan dan kajian di Sentra Gakkumdu Bantul, dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena tidak memenuhi bukti cukup.

"Jadi berhenti di tahap penyelidikan, tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan," ungkap Ketua Bawaslu Bantul, Harlina SH, Senin (30/11). Sementara dugaan pelanggaran oleh

Paslon lainnya, masih dalam proses.

Menurut Harlina, Bawaslu Bantul menyimpulkan peristiwa pemberian uang Rp 500 ribu yang direkam dalam video

memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 73 (1) jo Pasal 187 A UU No 1 Tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Hasil kajian Bawaslu itu kemudian dibawa ke Gakkumdu Bantul. Kemudian hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu, menyebutkan kajian Bawaslu itu berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan, terkait dengan tidak terpenuhi dua alat bukti. Yaitu ketidaksinkronan ke-

terangan pihak-pihak yang diklarifikasi, serta keaslian video harus diuji.

"Kesimpulannya dugaan pelanggaran Pilkada, tentang video pemberian uang Rp 500

ribu tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan video dari Paslon

lainnya tentang janji pemberian sapi masih dalam proses," pungkas Harlina. (Jdm)-d



Drs HM Gandung Pardiman MM meninjau kawasan irigasi yang mesinnya rusak.

GPC BANTU MESIN PENGAIRAN UNTUK PULUHAN HEKTARE SAWAH DAN DANA RP. 50 JUTA

Gandung : Dukung Penuh Pasangan 'NoTo' Komitmen Berantas Korupsi

BANTUL (KR) - Sekitar 29 hektare sawah tadah hujan di kawasan Srimulyo Piyungan akhirnya teraliri pengairan menyusul diberikannya bantuan mesin pompa pengairan oleh Gandung Pardiman Center (GPC) milik anggota DPR RI Komisi VII Drs HM Gandung Pardiman MM. Air yang mengalir sawah di 4 kawasan ini diharapkan mampu menunjang pertanian warga yang selama ini sawah mereka hanya mengandalkan dari tadah hujan. Selain itu Gandung juga memberi bantuan dana Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah mesin dan lingkungan pengangkutan air dari sungai.

Kepada KR, Senin (30/11) Drs HM Gandung Pardiman MM, saat temu warga dan memberikan

bantuan di kawasan Jombor Srimulyo Piyungan menurunkan GPC memiliki 3 unit truk. Satu truk diberikan kepada warga supaya diambil mesinnya (dibeleh) untuk kebutuhan mesin pompa pengairan.

"Saya mendengar mesin truk kualitasnya lebih baik untuk pompa pengairan daripada mesin diesel pabrik. Saya punya 3 unit truk dan saya berikan satu unit. Mudah-mudahan warga di sini segera panen dengan hasil yang memuaskan dan maksimal," jelasnya.

Gandung yang melekat dengan slogan Berjuang Berjuang Beramal Peduli Semua menuturkan suatu keharusan adanya keluhan kesulitan warga segera ditangani dan dibantu.

Pihaknya mengapresiasi semangat Guyub Rukun warga sekitar.

Pada kesempatan ini, Gandung yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY kembali menekankan bahwa pasangan Cabup/Cawabup Suharsono-Totok Sudarto (NoTo) berkomitmen membawa Bantul lebih maju dan bebas korupsi. "Mari kita bersama-sama memberantas korupsi dan mendukung penuh penerangan pasangan Drs H Suharsono- Drs H Totok S MPd (NoTo) untuk memimpin Bantul pada Pilkada 9 Desember 2020," tegasnya.

Duku Jombor Srimulyo Piyungan, Nur Vembrianto menambahkan mesin pompa air yang ada sudah lama rusak. Akibatnya di kawasan

ini hanya mengandalkan tadah hujan. Setelah mendapatkan bantuan dari GPC diharapkan sawah kembali berproduksi secara maksimal.

Mesin pengairan nanti akan mengalir puluhan hektare sawah di 4 padukuhan yakni Padukuhan Ngijo, Padukuhan Prayan, Padukuhan Jalasutra dan Padukuhan Jombor.

"Hidup petani di kawasan kami hanya bergantung pada penggerak air mesin diesel ini. Alat yang ada selain rusak akibat usia yang sudah tua, ditambah terkena banjir 2011 lalu," tegasnya. Pihaknya berharap kelancaran menanam padi tetap terjaga dan memberi banyak faedah bagi lahan pertanian. (Aje)-d



Drs HM Gandung Pardiman MM bersama jajaran pengurus DPD Partai Golkar DIY dan tokoh masyarakat Jombor.



Drs HM Gandung Pardiman MM menyerahkan bantuan truk dan sejumlah uang secara simbolis kepada perwakilan masyarakat.

Hanura-Perindo Dukung AHM-JP



KR-Sukro Riyadi

Abdul Halim Muslih bersama Ketua DPC Perindo Bantul dan DPC Hanura Bantul.

BANTUL (KR) - Duet Cabup/Cawabup H Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP) makin optimis menatap Pilkada Bantul 9 Desember mendatang. Hal tersebut setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Bantul dan DPC Perindo Bantul ikut bergabung AHM-JP. Kepastian tersebut setelah

DPC Hanura dan DPC Perindo menggelar deklarasi di RM Sumber Roso Nuansa Ndeso Banguntapan Bantul, Senin (30/11). Dalam deklarasi tersebut juga dihadiri Cabup Abdul Halim Muslih, Anggota DPR RI Drs HM Idham Samawi, inisiator program yang juga Ketua Laskar Bima Garda Kabupaten Bantul, Nur Janis Langga Barana. Dalam dukungan tersebut juga dihadiri PHL Kabupaten Bantul yang dipecah.

Ketua DPC Partai Hanura Bantul Agus Setyabudi mengatakan, Hanura sudah menentukan pilihan mendukung AHM-JP untuk membawa Bantul lebih baik.

Ketua DPC Perindo Kabupaten Bantul, Beni Yulianingsih SH MH mengungkapkan, dukungan kepada AHM-JP sudah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Perindo.

(Roy)-d

BPD DIY Aktivasi Mobile Banking kepada ASN

BANTUL (KR) - Guna mempercepat digitalisasi daerah, Bank BPD DIY cabang Bantul terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bantul. Salah satu dengan aktivasi mobile banking bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di ling-

kungan Pemkab Bantul.

Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung, menyampaikan dari sisi transaksi penerimaan, telah diimplementasikan beberapa pajak daerah, pajak bumi dan bangunan serta retribusi secara nontunai dengan berbagai pilihan e-channel pembayaran. "Mulai dari penggunaan

ATM, mesin EDC, mobil banking, agen laku pandai maupun channel lain yang sudah bekerja sama dengan Bank BPD DIY seperti Gojek dan Tokopedia," jelas Trisna dalam siaran persnya, Senin (30/11).

Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Bantul, Munaryati, menyatakan saat ini ada 24 agen laku pandai tersebar di wilayah Bantul yang dapat menerima transaksi pembayaran PBB secara real time. Diharapkan, ke depan semakin banyak jumlah agen laku pandai Bank BPD DIY.

Para ASN diharapkan memberi edukasi kepada saudara dan lingkungan sekitarnya. Sehingga program digitalisasi daerah dapat meluas di masyarakat. (Aha)-d



KR-Istimewa

Aktivasi mobile banking yang dilakukan Bank BPD DIY kepada ASN di lingkungan Pemkab Bantul.

LAPORAN PANSUS I DPRD KABUPATEN SLEMAN

Mempercepat Penertiban dan Penegakan Perda

SLEMAN (KR) - Adanya aturan yang tumpang tindih dengan peraturan daerah (perda), membuat penertiban dan penegakan terhadap perda kurang maksimal. Namun dengan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini, diharapkan dapat mempercepat penertiban dan penegakan perda.

Ketua Pansus I DPRD Sleman Hj Ismi Sutarti SH mengatakan, di samping adanya aturan yang tumpang tindih, ternyata juga ada raperda yang kurang detail untuk dilakukan penindakan. Hal itu menyebabkan Satpol PP tidak bisa maksimal untuk melakukan penindakan atau penegakan perda.

"Ketika ada pelanggaran, Satpol tidak bisa menindak atau menertibkan. Soalnya dalam perda itu belum diatur secara detail," katanya saat menyampaikan laporan Pansus I DPRD Sleman, Senin (30/11).

Menurut Ismi, raperda itu untuk mempercepat penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman. "Raperda ini akan mengatur lebih detail tentang penegakan dan penertiban terhadap pelaksanaan perda. Sehingga nanti Satpol akan lebih cepat dalam melakukan penertiban dan penegakan," ujarnya.

Ketika raperda ini nanti ditetapkan, Satpol PP perlu

menambah Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu juga perlu menambah anggaran untuk operasional penertiban terhadap pelaksanaan perda-perda yang ada.

"Memang selama ini Satpol PP kekurangan SDM untuk melakukan penertiban sehingga perlu adanya tambahan SDM. Anggaran operasional juga perlu ditambah karena membutuhkan anggaran yang besar untuk melakukan penertiban," tegas politisi dari NasDem ini.

Kemudian Dinas Perhubungan juga perlu melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membantu pengaturan jalan di persimpangan, kemudian dilakukan pembinaan dan tata cara mengatur lalu lintas. "Memang masyarakat yang membantu mengatur lalu lintas itu cukup membantu dalam kelancaran jalan. Makanya perlu didata dan diberikan bimbingan," pintanya.

Di samping itu, adanya raperda ini diharapkan terjadi perbaikan perilaku dari masyarakat pada umumnya. Sehingga nantinya akan terwujud ketenteraman dan ketertiban umum. "Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum sangat dibutuhkan. Jadi ketika masyarakat sudah tertib, diharapkan ketenteraman dan ketertiban umum akan mudah terwujud," ucapnya. (Sni)-d



KR-Saifullah Nur Ichwan

Ismi saat menyerahkan laporan Pansus I ke Ketua DPRD Sleman.

LAPORAN PANSUS II DPRD KABUPATEN SLEMAN

Pendampingan Hukum bagi Warga Miskin

SLEMAN (KR) - Masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Sleman yang mempunyai persoalan hukum nantinya akan diberikan pendampingan hukum. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan keadilan di mata hukum.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Sleman B Ari Murti SE menjelaskan, banyak warga miskin dan rentan miskin yang tidak paham dengan hukum. Jika tersandung masalah hukum, masyarakat miskin dan rentan miskin tidak tahu untuk mendapatkan rasa keadilan.

"Mayoritas warga miskin ketika mempunyai masalah hukum, tidak tahu harus bagaimana bertindak. Bahkan tidak mempunyai biaya untuk menyewa seorang pengacara dalam membela hak-haknya," jelas Ari Murti saat menyampaikan laporan Pansus II dalam Rapat Paripurna DPRD Sleman, Senin (30/11).

Untuk melindungi hak-hak warga miskin dan rentan miskin, Pansus II DPRD Sleman telah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang bantuan hukum bagi warga

miskin. "Selama ini ketika masyarakat miskin atau rentan miskin terkendala masalah tidak ada yang bantu. Namun dengan adanya raperda ini, masyarakat miskin dan rentan miskin, nantinya bisa dibantu pemerintah," papar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Bantuan itu nantinya dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sekarang ini di Kabupaten Sleman sudah ada 22 LBH yang terakreditasi yang bisa mendampingi warga miskin dan rentan miskin. "Jadi nanti warga miskin itu bisa mengakses pendampingan hukum melalui LBH yang sudah terakreditasi. Kemudian nanti LBH yang akan 'reimburse' ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman," katanya.

Rencananya Pemkab Sleman mengalokasikan dana untuk pendampingan hukum bagi warga miskin dan rentan miskin. Anggaran itu masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Dinas Sosial. "Anggaran itu kami masukkan dalam program JPS di Dinas Sosial Sleman. Ketika nanti kurang, anggaran akan kami tambah lagi," pungkasnya. (Sni)-d



KR-Saifullah Nur Ichwan

B Ari Murti menyerahkan laporan Pansus II ke Pimpinan DPRD Sleman.